

Strategi dan Peran Perbankan Dalam Mendukung Investasi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Aviliani

07 Juni 2023

Keterbatasan APBN: Perlu dukungan pembiayaan swasta

Kebutuhan dana untuk *Nationally Determined Contribution*

- Kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap target *Nationally Determined Contribution (NDC)* mencapai Rp3.779,63 triliun.

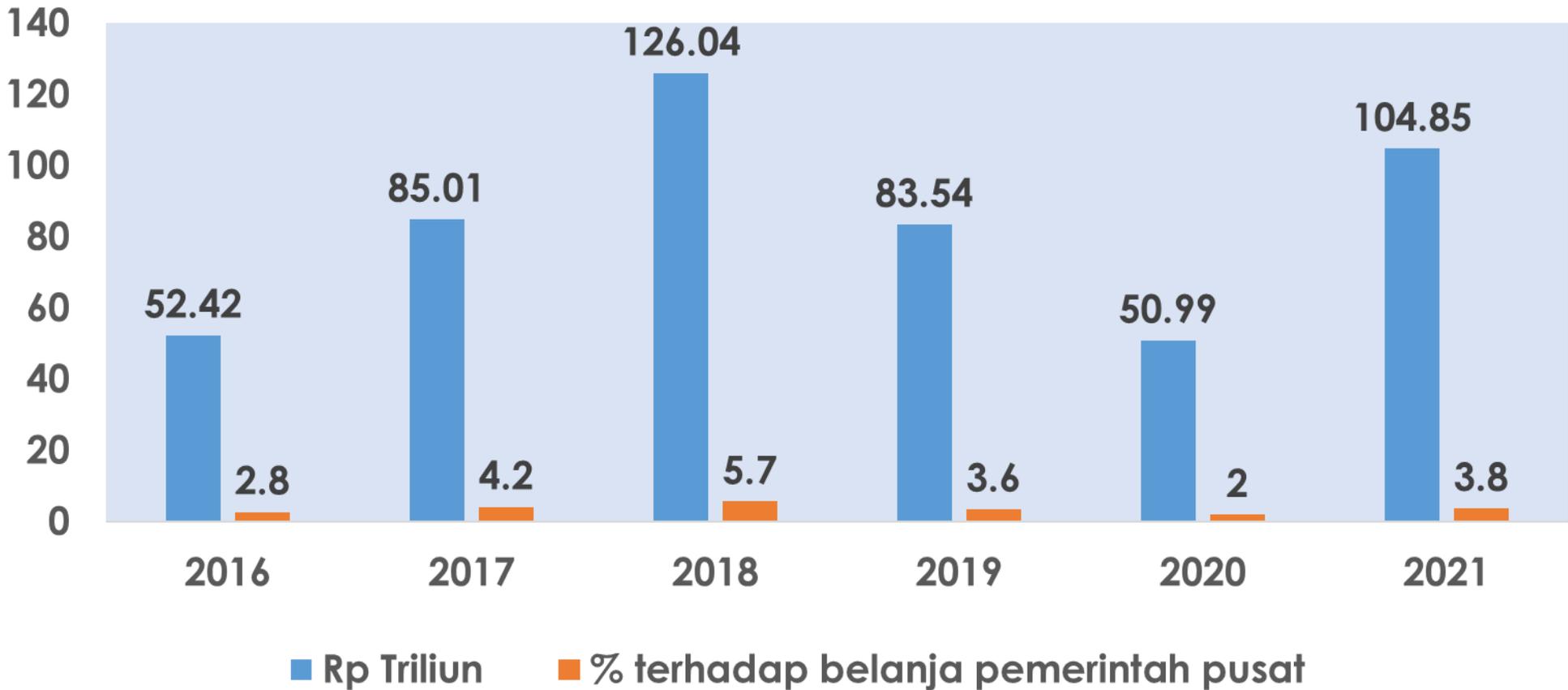
Kontribusi pemerintah terbatas

- Kontribusi pemerintah setiap tahun mencapai Rp96,78 triliun atau 4,1% dari total *climate budgeting* sebesar Rp288,4 triliun.

Mengisi gap pendanaan

- Total kebutuhan pembiayaannya sekitar Rp3.500-3.800 triliun.
- Perlu dukungan sekitar 2/3 dari kebutuhan dana setiap tahun dari sektor swasta.

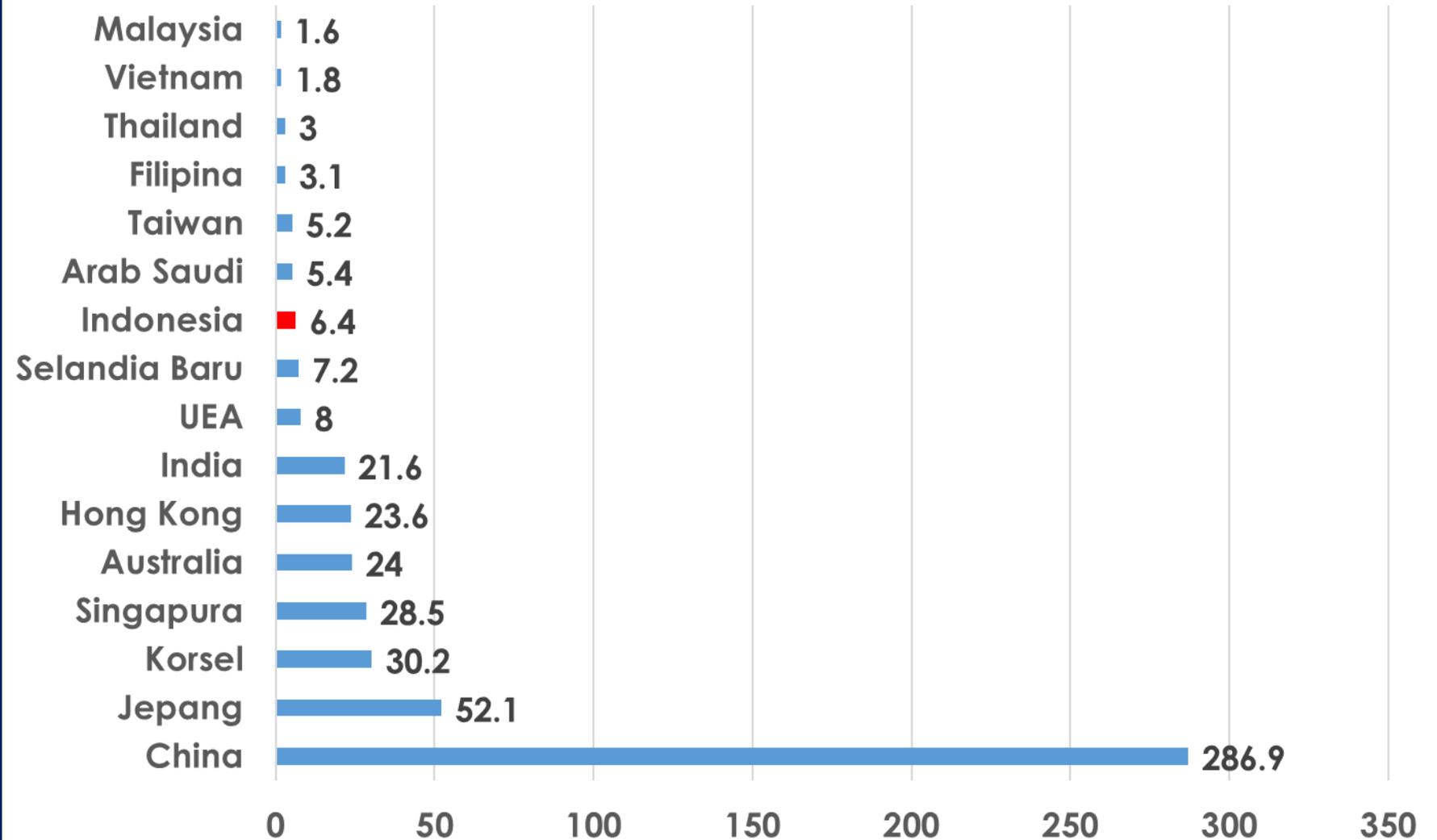
Belanja Pemerintah untuk Perubahan Iklim



Sumber: Kemenkeu (dalam Kompas, 2022)

- Rata-rata pangsa belanja pemerintah pada perubahan iklim masih di bawah 5% dari belanja pemerintah pusat.

Penerbitan Obligasi Hijau di Beberapa Negara (2018-2022)/US\$ Miliar



Sumber: Climate Bond Initiative (dalam Kompas, 2022)

- Sebagian besar penerbitan obligasi hijau didominasi pemerintah sekitar 70 persen, dan sisanya korporasi termasuk perbankan.

Peran Sektor Keuangan dalam Pembiayaan Hijau

Dukungan regulasi

- Sebagai tindak lanjut atas UU P2SK, pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) akan mencakup konsep *transition finance*.
- Tujuan → mendorong pembiayaan kegiatan usaha yang melakukan peralihan atau transformasi dari kegiatan yang menghasilkan emisi karbon tinggi menuju pada kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

Pembiayaan masih terbatas tetapi tumbuh

- Secara industri, pembiayaan perbankan berkategori hijau masih sekitar 15% dari total kredit.
- Namun, pertumbuhan pembiayaan hijau (khususnya bank-bank besar) naik rata-rata 25% per tahun selama 2020-2022.
- Alokasi terbesar → sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang keberlanjutan, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan air dan limbah berkelanjutan.

Demand dan Supply Pembiayaan Hijau Perbankan

Demand

- Desakan ekonomi dunia.
- Incentive yang diberikan terhadap pelaku.
- *Stakeholder* (pemerintah, bank sentral, dan swasta) menilai manfaat signifikan ekonomi hijau.
- Gap pembiayaan antara kebutuhan dan ketersediaan tinggi.
- Pembiayaan dari pemerintah yang terbatas.
- Peran pembiayaan dari swasta perlu ditingkatkan sehingga swasta harus masuk

Supply

- Portofolio bank masih didominasi pembiayaan non-hijau (bank memandang pembiayaan hijau berisiko tinggi)
- Aspek *liquidity mismatch risk*
- Pasar karbon yang belum berkembang.
- Persoalan sumberdaya manusia.
- Persoalan perbedaan suku bunga (hijau vs nonhijau).

Langkah ke Depan Mendorong Pembiayaan Hijau Perbankan

Memacu peningkatan kapasitas lembaga keuangan

- Kapasitas lembaga keuangan masih terbatas dalam mengidentifikasi risiko-risiko sosial dan lingkungan.
- Tantangan muncul dari ketersediaan sumberdaya manusia.
- Kurangnya tenaga ahli/kompeten di proyek hijau (tenaga ahli penilai independen proyek hijau).
- Kebutuhan sertifikasi tertentu dari lembaga internasional.

Perlu incentive dari pemerintah dan regulator sektor keuangan

- *Incentive* diperlukan untuk mengelola risiko pembiayaan berbasis lingkungan.
- Perlu meningkatkan *incentive* pada proyek-proyek pemerintah ramah lingkungan.
- Kemudahan untuk mendapatkan *incentive*.

Mengelola likuiditas pada proyek-proyek hijau

- Sebagian besar pembiayaan hijau berdurasi panjang sehingga perbankan harus mampu mengelola risiko *liquidity mismatch*.
- Konsep pembiayaan konsersium semakin relevan.

Aspek ketersediaan pembiayaan

- Komparasi perbandingan suku bunga kredit hijau vs non hijau.
- Sebagian besar pembiayaan demoninasi berbasis lingkungan menggunakan valas.
- Berpotensi memunculkan exchange rate risk dan interest rate risk.
- Perlu meningkatkan pembiayaan berdemonasi Rupiah.

Dukungan Regulasi: Kebijakan Makroprudensial

LTV, FTV dan RPIM untuk pembiayaan hijau

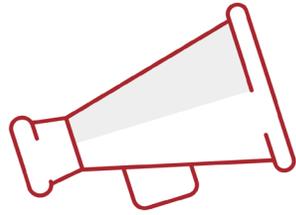
- Implementasi kebijakan makroprudensial sejak 2019 mendorong pertumbuhan pembiayaan hijau berupa ketentuan rasio Green Loan to Value (LTV)/ Financing to Value (FTV), dan Green Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

▪ **Ketentuan rasio LTV/FTV**

- Bank dapat memberi pembiayaan atau kredit hingga 100 persen khusus untuk properti berwawasan lingkungan.
- Properti dapat berupa rumah tapak, rumah susun, dan ruko atau rukan yang memenuhi kriteria bangunan hijau dengan nilai agunan berkisar Rp 5 miliar-Rp 10 miliar.
- BI menghapus ketentuan batasan minimum uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*). Sebelumnya, uang muka minimum 5-20 persen.
- Ketentuan rasio LTV/FTV dan uang muka kendaraan bermotor listrik berlaku sampai akhir tahun 2023 dan diharapkan dapat mempercepat pengurangan emisi karbon.

- **Penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor hijau juga digenjut dengan pemberian insentif.**
 - Sejak April 2023 → insentif kredit ke UMKM yang bergerak di bidang lingkungan dan perubahan iklim.
 - Insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) paling tinggi 1,5 persen.
 - Pelonggaran GWM dinilai cukup menarik akan meningkatkan likuiditas perbankan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II



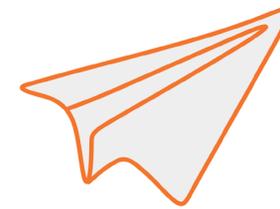
Meningkatkan Kesadaran / Increasing Awareness

1. **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019).**
Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019).
2. **Pengenalan prinsip keuangan berkelanjutan.**
Introduction of sustainable finance principles.
3. **Pengenalan kategori kegiatan usaha berkelanjutan.**
Introduction of sustainable business activities category.
4. **Pengembangan insentif.**
Development of incentive schemes.
5. **Program pengembangan kapasitas.**
Capacity building programs.



Celah / Gap

1. Rendahnya pemahaman industri.
Low awareness of the industry.
2. Belum adanya standarisasi hijau.
Unavailability of green standard.
3. Peluang besar yang belum dimanfaatkan.
Untapped opportunities.
4. Belum terintegrasinya risiko LST.
ESG risk has not been integrated.
5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan K/L.
Improvement on coordination and collaboration with ministries/institutions.



Mempercepat Transisi menuju Keberlanjutan / Accelerating the Transition to Sustainability

1. Pengembangan di sisi **Penawaran:**
 - Skema insentif,
 - Inovasi produk,
 - Teknologi dan informasi,
 - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.**Supply side development:**
 - Incentive schemes,
 - Product innovation,
 - Information and technology,
 - Capacity building.
2. Pengembangan di sisi **Permintaan:**
 - Kampanye nasional,
 - Dukungan program riil,
 - Pengembangan industri pendukung,
 - Sertifikasi "green".**Demand side development:**
 - National campaign,
 - Real programs,
 - Development of supporting industries,
 - "Green" certification.



Gambar 1. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia /

Sekian dan Terima Kasih